

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP KASUS TKI ILEGAL DI MALAYSIA

THE REPUBLIC OF INDONESIA FOREIGN POLICY TOWARDS MIGRANT

WORKER CASES IN MALAYSIA

SKRIPSI



Disusun oleh :

Afifah Zabarij Musta'fifah

20010510256

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP KASUS TKI ILEGAL DI MALAYSIA

THE REPUBLIC OF INDONESIA FOREIGN POLICY TOWARDS MIGRANT

WORKER CASES IN MALAYSIA

SKRIPSI

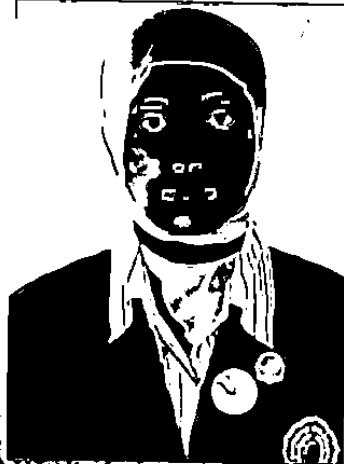


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Terhadap Kasus TKI Ilegal Di Malaysia"



Aman Zabari Mustafah

20010510256

Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran dan dinyatakan lulus dan disahkan di depan tim penguji skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada:

Hari / tanggal : Sabtu, 6 Mei 2006

Pukul : 09.30 selesai

Tempat : Ruang Pendadaran HI B

Tim Penguji

Dr. Tulus Warsito

Ketua

Wahyuni Kartikasari ST SIP Msi

Penguji I

Sudiyono SU

Penguji II

Mengetahui,

Sugana Rivanto STP Msi

*And Allah would strengthen the truth with Thy resolution,
eventhough, they, the sinner did not like it (Yunus; 82)*

*There's no joy without the pain, it's the pain that makes it strong,
though sometimes it's just so hard to carry on, but however, get yourself*

**Dengan segala bakti, skripsi ini dipersembahkan
untuk yang tercinta :**

Mbahti, (alm) Hj Siti Tisnoliyah Koensjarwanie

Danak Dan Alhamdulillah

KATA PENGANTAR

Permasalahan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia nampaknya tidak hanya berkisar pada masalah-masalah politik dan kekuasaan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan sektor ekonomi, khususnya kesejahteraan rakyat, ternyata juga sangat penting untuk dicermati, meskipun sebenarnya akar masalahnya adalah sama, yakni politik dan kekuasaan. Dapat dikatakan, apa yang terpaksa harus dialami oleh bangsa saat ini, tidak lain adalah karena *instabilitas* politik yang terjadi, dan berkepanjangan. Pasca kejatuhan rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada akhir tahun 1990an menyusul terjadinya krisis moneter, menjadi awal keterpurukan baru bagi segenap bangsa.

Setelah digantikan oleh Presiden BJ Habibie, masalah tidak kunjung terselesaikan, justru semakin parah. Puncaknya adalah lepasnya propinsi termuda di Indonesia, Timor Timur (Timor Leste). Pada saat yang bersamaan, terjadi berbagai kemelut, terutama yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi, yang telah mampu memicu kekacauan di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, hal itu memicu kerusuhan rasial di banyak tempat yang menimpa WNI keturunan asing, terutama dari etnis Tionghoa.

Rakyat yang semakin terhimpit kemudian banyak yang memutuskan untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri dengan menjadi TKI, mengingat kurs Dolar AS yang menembus angka Rp10.000,00, membuat harga barang-barang kebutuhan pokok tidak lagi terjangkau. Akan tetapi, langkah itu juga tidak dapat dijalani dengan mulus. Birokrasi yang harus ditempuh untuk menjadi seorang TKI, cukup panjang dan rumit. Disamping itu, biaya pemberangkatan juga tidak dapat dikatakan kecil. Sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk menjadi TKI ilegal dengan Malaysia sebagai negara tujuan terdekat.

Hal itu memicu terjadinya ledakan imigran gelap di Malaysia, meskipun

mengganggu, namun di sisi lain, TKI membantu Pemerintah RI untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yakni Kesejahteraan Ekonomi. Maka, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memberikan amnesti, sehingga para imigran gelap termasuk TKI ilegal, dapat kembali ke negaranya untuk kemudian kembali lagi bekerja di Malaysia dengan dokumen sah. Namun, keputusan tersebut ternyata tidak juga menyelesaikan masalah yang ada.

Kabinet baru yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla terpaksa harus berhadapan dengan *kemelut* yang banyak dipercaya sebagai peninggalan Orde Baru tersebut. Pemerintah RI, dalam hal ini memang harus bekerja ekstra karena perlindungan para TKI ilegal maupun yang legal yang saat ini sedang terancam tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Seterjal apapun jalan yang harus ditempuh, pemerintah tetap harus berjuang untuk melindungi WNI yang sedang berada di luar teritorial NKRI, dengan perantara Departemen Luar Negeri RI sebagai perangkat politik luar negeri.

Penulis berharap, meskipun masih belum dapat dikatakan sempurna, karya tulis ini dapat menjadi pembanding sekaligus perekam sejarah ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan kasus TKI ilegal di Malaysia.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 12 Mei 2006

Afifah Zabarij Musta'fifah

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman pengesahan	ii
Motto	iii
Halaman persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Tujuan Penelitian	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Kerangka Dasar Pemikiran	7
F. Hipotesis	18
G. Metode Pengumpulan Data	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. KETENAGAKERJAAN MIGRAN DI INDONESIA	21
A. Ketenagakerjaan Migran di Indonesia	21
B. ...	21

BAB III. HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TERKAIT KASUS-KASUS TKI ILLEGAL	36
A. Hubungan Diplomatik RI – Malaysia Sebagai Negara Tetangga	37
B. TKI di Malaysia	41
1. TKI Ilegal Dan TKI Legal	44
C. Penyebab Munculnya TKI Ilegal di Malaysia	47
BAB IV. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KASUS TKI ILEGAL DI MALAYSIA	58
A. Kewajiban Perlindungan WNI	58
B. Upaya Penanganan dan Penanggulangan	66
1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Sebagai Langkah Penanggulangan	66
2. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah TKI Ilegal Di Malaysia	71
BAB V. PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

Daftar Tabel

Tabel 2.1, Inflasi Indonesia dan Negara-negara ASEAN tahun 1998 – 2004 (persen)	22
Tabel 2.2, Peta Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2005	25
Tabel 2.3, Penempatan TKI di Kawasan Asia Pasifik tahun 2005	26
Tabel 2.4, Materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan	34
Tabel 3.1, Penempatan TKI Kawasan Asia Pasifik tahun 2005 (Daerah Asal)	50

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Lampiran 1, Kurikulum Pembekalan Akhir Pemberangkatan	83
Lampiran 2, Rekapitulasi Kasus TKI Bulan Januari – Juni 2005	86
Lampiran 3, Resolusi DDB 50/200	88